

## RINGKASAN

Salah satu sumber pendapatan untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dalam sektor pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengubah sistem pengelolaan PBB khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dari bulan Februari sampai dengan April 2018. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi dan potensi PBB-P2 dan BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2017. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan teknik analisis deskriptif menggunakan indikator nilai interpretasi efektivitas, efisiensi, dan kontribusi serta potensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 secara keseluruhan sangat efektif, dengan rata-rata persentase PBB-P2 sebesar 109,92% dan BPHTB sebesar 135,73%. Tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 secara keseluruhan sangat efisien, dengan rata-rata persentase PBB-P2 sebesar 4,55% dan BPHTB sebesar 3,68%. Kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat kurang, dengan rata-rata persentase PBB-P2 sebesar 9,07% dan BPHTB sebesar 6,37%. Potensi PBB-P2 dapat meningkat sebesar 39,59% dan potensi BPHTB meningkat 28,82%.

Implikasi kesimpulan diatas adalah dimasa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mempertahankan pencapaian efektifitas dan efisiensi yang telah diraih, meningkatkan kontribusi PBB-P2 dan BPHTB terhadap PAD dengan menetapkan target sesuai potensi yang ada.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Potensi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

